

HUKUM

Kasus Korupsi Dana Bencana BNPB,  
KPK Beberkan Peran Eks Kepala BNPB  
ke Puspom TNI  
Halaman 2

KRIMINAL

Timnas BEM FH Unpas Terima 13 Aduan  
Dugaan Pelecehan Seksual, Mahasiswa  
Desak Dosen Terduga Diusut Tuntas  
Halaman 6

HARIAN

# MERDEKA

SABTU, 17 OKTOBER 2026

ASPIRASI RAKYAT

Rp. 15.000 | TERBIT SORE  
[www.harian-merdeka.com](http://www.harian-merdeka.com)



## Grup Astra Agro Diduga Kuasai Lahan Ilegal di Sulbar, Kapolri: Diteruskan ke Kabareskrim

JAKARTA | Dugaan penguasaan tanah secara ilegal seluas 1.763 hektare di luar Hak Guna Usaha (HGU) yang melibatkan anak perusahaan perkebunan raksasa di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, kini memasuki babak baru. Sorotan publik yang kian masif hingga tanggapan resmi dari pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mendorong desakan penegakan hukum yang transparan dan tanpa pandang bulu.

Halaman 7



## Dugaan Korupsi Kredit Bank BUMN Rp629 M Proyek Apartemen di Bekasi Naik Penyidikan



KOTA BEKASI | **Harian Merdeka**

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mendalami dugaan tindak korupsi terkait fasilitas kredit perbankan.

Dugaan pidana korupsi tersebut melibatkan PT Takke Group atau PT. ADS untuk proyek Apartemen Metro Galaxy Park di Bekasi.

Kabag Ops Kortastipidkor Polri, Kombes Yusuf Afandi mengatakan, penyidik telah meningkatkan kasus ke tahap penyidikan dengan memeriksa Direktur Utama PT ADS Laurence M. Takke.

“Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada Selasa 6 Oktober 2026,” kata Yusuf kepada wartawan, Jumat, 16 Oktober 2026.

Yusuf menerangkan perkara ini berkaitan dengan pembiayaan kredit dari Bank BUMN sebesar Rp629,8 miliar untuk proyek Apartemen Metro Galaxi Park di Bekasi yang dikelola PT ADS selaku pengembang.

“Pencairan dana tersebut diduga tidak sesuai dengan SOP perbankan,” kata Yusuf.

Seiring berjalannya waktu, penyidik menemukan dugaan tindak pidana yang saat ini masih proses pengumpulan alat bukti.

“Penyidik masih fokus dalam proses pembuktian dan melengkapi alat bukti sesuai pasal 235 (1) KUHP sebelum melakukan penetapan tersangka dan penahanan,” kata Yusuf.

Polisi sudah melakukan penggeledahan di Kantor Takke Group/PT ADS dan kediaman Laurence M. Takke.

Sejauh ini, penyidik telah melakukan penyitaan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas PT ADS. Di antaranya, dokumen umum perusahaan, akad kredit awal, Top Up 1, Top Up 2, seluruh tahapan pencairan kredit, dan dokumen restrukturisasi. ● (Egi)

## Kasus Korupsi Dana Bencana BNPB, KPK Beberkan Peran Eks Kepala BNPB ke Puspom



JAKARTA |  
**Harian Merdeka**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberitahukan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengenai peran mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Suharyanto, dalam kasus dugaan korupsi terkait penggunaan dana siap pakai BNPB.

“Untuk Kepala BNPB (Suharyanto, red.), saat ekspose sudah dijelaskan juga posisinya kepada rekan-rekan Puspom TNI yang sudah hadir, baik pada tanggal 13 (Selasa, 13/10) dan 14 (Rabu, 14/10) yang lebih lengkap,” kata Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026) malam sebagaimana dikutip Antara.

Taufik juga mengatakan bahwa KPK telah menyampaikan progres penanganan perkara terkait dugaan korupsi di BNPB tersebut kepada Puspom TNI.

Adapun dia mengatakan bahwa salah satu pihak Puspom TNI yang diberitahukan oleh KPK tersebut adalah dari unit penyidikan.

“Ada dari unsur unit penyidikannya juga yang hadir saat itu,” katanya.

Sementara itu, dia mengatakan pihak Puspom TNI juga sempat mendampingi tim KPK di lapangan.

“Ada beberapa rekan-rekan dari Puspom TNI yang mendampingi kegiatan pada saat di Kantor BNPB terkait dengan pemasangan segel. Itu juga sudah dilakukan bersama-sama dengan Puspom TNI,” ujarnya.

KPK juga akan bersurat kepada Panglima TNI dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang melibatkan prajurit aktif.

“Tentunya kami secara formal akan bersurat kepada Panglima TNI karena ini menyangkut TNI aktif,” kata Taufik.

Selain itu, Taufik

memastikan KPK akan melakukan kolaborasi dengan TNI dalam penanganan kasus tersebut.

“Kami pendekatannya kolaboratif sehingga ada sinergi dalam proses penanganannya,” katanya.

Dengan demikian, lanjut dia, baik KPK maupun TNI tidak melakukan penyidikan secara mandiri.

“Jadi, kami tidak melakukan penyidikan secara sendiri-sendiri, tetapi memang kemudian itu dilakukan sinergi dalam proses penyidikannya,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB dengan menangkap 15 orang pada 13 Oktober 2026.

Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus tersebut. Salah satunya Bima Setiawan selaku adik mantan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto.

Bima juga sempat menjadi Tenaga Ahli Kepala BNPB saat Suharyanto aktif menjabat.

Kemudian, empat orang tersangka lainnya adalah pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwaka Sigit, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, Direktur PT Trans Lintas Selaras Gery Prasetiawan, serta pihak swasta Syifa Nrika Ghifarin. ● (Egi)

Redaksi **MERDEKA**

Diterbitkan Oleh : PT.JAKARTA RAYA PERS

Pemimpin Umum : Helmy Halim, Pemimpin Perusahaan : Alan Oskar, Wakil Pemimpin Perusahaan : Verencia Mercy, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Helmy Halim, Wakil Pemimpin Redaksi : Abdul Rohman, Redaktur Eksekutif : Egi Hendrawan, Redaktur Pelaksana : Agus Irawan, Redaktur : Andri Achdiat, Budi Santoso, Taufik, Saepudin, Adam Kamal, Reporter : Aceng Abidin, Ahmad Baladi, Sahrul, Robi Liu, Prayitno, Edi.ST, Nurziman, Rafiudin, Abdul Aziz, Siti Marko, RA. Sudrajat, Syarif Hidayat, Irwani Heliawan, Abidin, Hasuri, Mukhtar, Jan Zarian, Juli Rabiati, H.Mulyadi, Didit, Daenk, Ali.R., Kabiromo Medan : Umar, S.Pd.I Perwakilan Nias (Sumut) Adi Laoli, Sekretaris Redaksi : Syafina Azzahra, Keuangan : Yosefin Arwinda Devi, Manager Iklan : Muksin, P.Adi, Iklan : S Fajar, Wilki Irawan, Pemasaran : Hendro, Anwar, Saunan, Agus Black, Dian, Layout : Bobby Saputra, Fuad, IT Web : Walid, Amel, Bagian Umum/OB : Wawan, Penasehat Hukum : Hanafi Tanawijaya, SH, Dedi Suryadi. SH

Kantor Usaha/Redaksi : Rukan Golden Fatmawati, Jl.RS Fatmawati G-34 No.15 RT.008 RW.006, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. NO. REK. BANK MANDIRI KCP JAKARTA KEMENDIKBUD 1220011807917 a/n JAKARTA RAYA PERS.Telp:081212262686

Kantor Perwakilan : Ruko ModernLand Blok R 30, Jalan Hartono Raya Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Telepon : (021) 59728637. (isi di luar tanggungjawab percetakan)

# Kejagung Tahan Direktur PT TPL Terkait Dugaan Suap Pajak dan Korupsi Rp 2 T

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Kejaksaan Agung menetapkan Direktur PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk berinisial AL sebagai tersangka dugaan korupsi melalui manipulasi harga transaksi dengan perusahaan afiliasi pada periode 2008–2025.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jam-pidsus) menetapkan AL sebagai tersangka pada Kamis (15/10).

“Menetapkan satu orang tersangka pada Kamis (15/10) terhadap AL selaku Direktur merangkap Corporate Secretary PT TPL,” katanya.

Menurut Anang, penyidik menangkap AL di Medan, Sumatera Utara, Kamis (15/10), setelah yang bersangkutan sebelumnya tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

AL yang menjabat direktur

sekaligus sekretaris perusahaan PT TPL diduga terlibat dalam manipulasi transaksi penjualan produk bubuk kertas atau pulp kepada perusahaan afiliasi di luar negeri serta pembeli dalam negeri.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT TPL menjual produk pulp kepada perusahaan afiliasi DP MMI, Ltd., serta melakukan penjualan dalam negeri kepada pabrik APR.

Anang menjelaskan tersangka diduga melakukan praktik pencantuman nilai transaksi lebih rendah dari yang sebenarnya (under-invoicing) melalui manipulasi klasifikasi produk berdasarkan kode Harmonized System (HS).

“Kegunaan dan harga nilai pasar produk tersebut seharusnya merupakan produk dissolving pulp, namun diubah menjadi produk paper grade pulp/bleached hardwood kraft pulp (BHKP),” katanya.

Perubahan klasifikasi tersebut diduga menyebabkan harga



produk yang dilaporkan tidak mencerminkan karakteristik dan nilai pasar sebenarnya.

Selain itu, PT TPL berkewajiban menyampaikan dokumen penentuan harga transfer (transfer pricing documentation) dan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak badan kepada otoritas perpajakan.

Namun, penyidik menduga AL menyampaikan laporan transaksi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Anang juga mengungkapkan dugaan pemberian uang kepada pemeriksa pajak agar pengawasan dan pemeriksaan terhadap kewajaran transaksi perusahaan tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

“Tersangka AL secara melawan hukum memberikan

sejumlah uang kepada pemeriksa pajak (fiscus) agar tidak dilakukan pengawasan dan dalam menelaah kertas kerja pemeriksaan/pengawasan (KKP) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) tidak didasarkan pada audit program yang telah disusun,” jelasnya.

Akibat dugaan perbuatan tersebut, pemeriksa pajak tidak melakukan perbandingan harga maupun pengecekan kewajaran nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen harga transfer dan laporan pajak PT TPL.

“Perbuatan tersangka AL bersama-sama dengan pemeriksa pajak tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp2 triliun,” kata Anang.

● (Agus)

## Dua Kali Mangkir, KPK Didesak Jemput Paksa Nusron Wahid



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak mengambil langkah tegas terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, yang disebut dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) Summarecon di Kabupaten Bogor.

Desakan tersebut disampaikan Hamdi Putra dari Forum Sipil Bersuara (FORSIBER), Jumat (16/10/2026). Ia meminta KPK tidak berhenti pada pernyataan mengenai kemungkinan jemput paksa, tetapi memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan hukum.

Menurut Hamdi, ketidakhadiran Nusron dalam dua agenda pemeriksaan perlu ditindaklanjuti dengan langkah yang jelas. Apabila persyaratan hukum untuk menghadirkan saksi secara paksa telah terpenuhi, KPK diminta menggunakan kewenangannya sesuai prosedur yang berlaku.

“KPK jangan sampai hanya gertak sambar. Jika syarat hukumnya terpenuhi, jemput paksa harus dilaksanakan,” demikian sikap yang disampaikan Hamdi dalam keterangannya.

Dua Kali Tidak Hadir dalam

Pemeriksaan KPK

Berdasarkan informasi yang disampaikan FORSIBER, Nusron tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi pada 7 Oktober 2026 dengan alasan agenda internal kementerian.

KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada 15 Oktober 2026. Namun, Nusron kembali tidak hadir. Dalam keterangan yang dikutip FORSIBER, KPK menyatakan belum menerima konfirmasi mengenai alasan ketidakhadiran pada pemanggilan kedua.

Situasi tersebut memunculkan desakan agar penyidik segera menentukan langkah lanjutan untuk memastikan pemeriksaan dapat dilaksanakan.

Hamdi menilai, jabatan sebagai menteri tidak semestinya menjadi penghalang bagi proses penegakan hukum. Setiap warga

negara yang dipanggil secara sah oleh penyidik wajib menghormati proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Meski demikian, tindakan jemput paksa tidak dapat dilakukan semata-mata karena seseorang tidak hadir dalam pemeriksaan. Pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan hukum dan prosedur yang berlaku.

Jemput paksa juga tidak serta-merta menunjukkan seseorang bersalah atau menjadikannya tersangka.

Dalam konteks ini, Nusron disebut dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi.

Empat Tersangka Disebut sebagai Orang Kepercayaan Nusron FORSIBER menilai pemeriksaan Nusron penting untuk membantu penyidik mengungkap perkara dugaan korupsi di lingkungan pertanahan. ● (Agus)

## Wacana Penyaluran Gaji ASN via Kopdes, DPR RI Ingatkan Keamanan dan Hak Pegawai



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Rencana pemerintah untuk menyalurkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih mendapat tanggapan mendalam dari parlemen. Komisi II DPR RI mengingatkan agar wacana tersebut dikaji secara matang sebelum diimplementasikan secara luas.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya mengungkapkan bahwa skema pembayaran gaji PNS melalui Kopdes Merah Putih ditargetkan mulai berjalan pada 2026. Usulan ini telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna mematangkan mekanismenya.

“Mekanismenya mungkin sudah dianggarkan nanti pembayarannya, sudah diajukan ke Kementerian Keuangan, sudah akan siap dibayarkan,” ujar Ferry di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2026).

Ferry menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat peran koperasi dalam layanan keuangan serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat di tingkat desa. Kendati demikian, rincian teknis, jumlah ASN yang terlibat, hingga kriteria koperasi yang ditunjuk masih dalam tahap pematangan.

### DPR Ingatkan Risiko Sistem dan Dampak terhadap BPD

Menanggapi wacana tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf, menyatakan apresiasinya terhadap niat pemerintah menguatkan ekonomi desa. Namun, ia menekankan pentingnya kehati-hatian agar kebijakan ini tidak menimbulkan persoalan baru.

“Kita hormati usulan Menkop untuk memperkuat Kopdes Merah Putih demi pembangunan ekonomi di desa. Namun, terkait rencana penyaluran gaji ASN, menurut saya masih perlu dikaji lebih matang. Jangan sampai niat baik tersebut justru menimbulkan persoalan baru,” kata Dede Yusuf saat dihubungi, Sabtu.

Dede menyoroti sejumlah aspek krusial, seperti keamanan penyaluran dana, ketepatan jadwal pembayaran, hingga kesiapan sistem operasional koperasi. Selain itu, ia juga mengingatkan dampak signifikan kebijakan ini terhadap keberlangsung Bank Pembangunan Daerah (BPD). ● (Egi)

## Ketua Komisi XIII: Dampak Kabut Asap Karhutla Merupakan Pelanggaran HAM

PALEMBANG |  
**Harian Merdeka**

Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesehatan masyarakat, termasuk tingginya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), perlu menjadi perhatian dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karenanya, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) harus menelusuri titik-titik karhutla di Sumatra Selatan melalui koordinasi dengan instansi terkait dan organisasi masyarakat sipil.

“Ini pelanggaran HAM, Pak. Walaupun ini bukan tugas Bapak, tapi domain HAM-nya ada,” ungkap Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya saat Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII di Palembang, Sumatra Selatan, Jumat (9/10/2026). Legislator NasDem itu menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, termasuk tingginya jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Ia menilai persoalan karhutla tidak cukup dilihat sebagai masalah lingkungan, tetapi juga perlu dicermati dari sisi hak masyarakat atas kesehatan dan lingkungan hidup yang baik.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palembang yang diberitakan pada 7 Oktober 2026, tercatat 17.434 kasus ISPA sepanjang September 2026. Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mencatat 52.483 kasus ISPA pada periode yang sama.

Data tersebut meng-



gambarkan besarnya beban masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian di tengah kondisi kabut asap. Willy meminta titik-titik kebakaran yang berpotensi berdampak terhadap masyarakat diperiksa lebih lanjut. Penelusuran tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran kondisi di lapangan dan memperkuat tindak lanjut terhadap persoalan yang menyangkut hak masyarakat.

“Titik-titik spot apinya ini pelanggaran HAM, kita cek dulu. Kita ini kan terdampak semua ini, Pak,” ujarnya.

Berdasarkan informasi Pemerintah Kota Palembang pada 7 Oktober 2026, dari 66 kejadian karhutla yang terpantau di Sumatera Selatan, tiga terjadi di wilayah Palembang dan 63 lainnya di luar kota. Pada hari yang sama, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Stasiun Palembang Bukit Kecil tercatat mencapai 717, yang masuk kategori berbahaya.

Selain menyoroti dampak karhutla, Willy mendorong penguatan kolaborasi antara jajaran Kementerian HAM,

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), lembaga bantuan hukum (LBH), organisasi lingkungan, serta perguruan tinggi. Menurutnya, kerja sama lintas lembaga diperlukan untuk memperluas jangkauan pengawasan dan mengatasi keterbatasan sumber daya dalam penanganan persoalan HAM.

“Ini zaman kolaborasi. Di sini LBH ada, WALHI ada, hebat-hebat di sini. Jadi habis ini, mumpung LPSK belum pulang, koordinasi,” katanya.

Willy juga menilai keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan kalangan akademisi, termasuk Universitas Sriwijaya, dapat membantu lembaga negara mengidentifikasi persoalan di masyarakat dan memperkuat pengawasan. Sinergi tersebut diharapkan membuat penanganan dampak karhutla terhadap masyarakat lebih terkoordinasi dan responsif.

Melalui kunjungan tersebut, Komisi XIII mendorong agar dampak karhutla terhadap kesehatan dan hak masyarakat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan kondisi lapangan serta koordinasi antarlembaga. ● (Egi)

# Prabowo Ultah ke-75, Dasco Unggah Momen Kebersamaan dan Doa Khusus



JAKARTA |  
**Harian Merdeka**

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merayakan ulang tahun yang ke-75 pada hari ini, Sabtu (17/10/2026). Momen ini menjadi perayaan ulang tahun kedua Prabowo sejak resmi dilantik sebagai orang nomor satu di Indonesia pada 20 Oktober 2024 lalu.

Di hari spesial ini, ratusan tokoh politik hingga pejabat negara beramai-ramai menyampaikan ucapan selamat dan doa untuk sang Kepala Negara.

Salah satu ucapan datang dari Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Melalui akun Instagram

resminya, Dasco mengunggah kolase foto yang menampilkan momen kebersamaannya dengan Prabowo dari tahun ke tahun.

"Kami Bersama Prabowo. Semoga Allah SWT menjaga kesehatan Bapak, menguatkan setiap langkah, dan menerangi setiap keputusan yang Bapak ambil untuk Indonesia," tulis Dasco dalam keterangan unggahannya.

Tak ketinggalan, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, turut memberikan selamat atas bertambahnya usia Presiden.

Sambil mengunggah foto berdua bersama Prabowo, selebritas sekaligus pejabat publik terse-

**Kami Bersama Prabowo. Semoga Allah SWT menjaga kesehatan Bapak, menguatkan setiap langkah, dan menerangi setiap keputusan yang Bapak ambil untuk Indonesia,"**

Sufmi Dasco Ahmad  
Wakil Ketua DPR RI

but menyelipkan doa agar sang Presiden senantiasa diberi keberkahan dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam memimpin Indonesia. Aamiin," ujar Raffi. ● (Egi)



## BPKH dan BRIN Luncurkan Dai Sejuta Mimbar, Ajak Anak Muda Siapkan Haji Sejak Dini

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Persiapan ibadah haji dan perkembangan dakwah di media sosial menjadi dua hal yang disorot Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam mendorong peran generasi muda di era digital.

Upaya tersebut diwujudkan melalui peluncuran Program Dai Sejuta Mimbar di Auditorium Gedung B.J. Habibie, BRIN, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Program ini dikembangkan bersama Yayasan Harika untuk Kemanusiaan, dengan menghubungkan edukasi perencanaan haji dan pengembangan dakwah melalui platform digital. Bagi BPKH, kesadaran menunaikan ibadah haji perlu dibangun jauh sebelum seseorang berangkat ke Tanah Suci.

Persiapan tersebut mencakup pemahaman agama, kesiapan spiritual, hingga kemampuan mengatur keuangan dalam jangka panjang. Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander, mengatakan generasi muda perlu memahami bahwa perencanaan haji membutuhkan komitmen yang dibangun secara bertahap.

"Persiapan ibadah haji perlu dimulai sejak usia muda. Haji bukan hanya tentang keberangkatan ke Tanah Suci, tetapi juga tentang membangun komitmen jangka panjang melalui perencanaan keuangan yang disiplin," ujar Harry.

Pendekatan itu diterapkan melalui Program Haji Muda yang mendorong anak muda membangun kebiasaan menabung, memahami pengelolaan keuangan, dan mencari informasi haji dari sumber yang tepat.

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga membuka ruang bagi generasi muda untuk menyampaikan pesan keagamaan dengan cara yang lebih dekat dengan keseharian masyarakat. Media sosial, video pendek, dan podcast menjadi sarana yang dapat dimanfaatkan untuk menjangkau kelompok audiens yang lebih luas.

Namun, kemudahan memproduksi dan menyebarkan konten menghadirkan tantangan tersendiri. Pesan keagamaan yang disampaikan secara digital perlu memiliki dasar pengetahuan yang kuat agar tidak berhenti pada popularitas semata. ● (Egi)

## BEM FH Unpas Terima 13 Aduan Dugaan Pelecehan Seksual, Mahasiswa Desak Dosen Terduga Diusut Tuntas

BANDUNG |  
Harian Merdeka

Dugaan kasus pelecehan seksual di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pasundan (FH Unpas) menjadi sorotan setelah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menerima 13 laporan dari mahasiswa lintas semester yang mengaku menjadi korban.

Ketua Umum BEM FH Unpas, Dhean Salvez, mengungkapkan, berdasarkan penelusuran awal, terdapat sekitar empat hingga enam oknum dosen yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Informasi itu masih berupa temuan awal berdasarkan laporan yang diterima BEM dan perlu ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan yang objektif.

"Sejauh ini kami telah menerima 13 laporan dari korban yang merupakan mahasiswa lintas semester. Dari laporan yang masuk, teridentifikasi ada sekitar empat sampai enam oknum terduga pelaku," ujar Dhean Salvez,

Jumat (16/10/2026).

Munculnya laporan dari mahasiswa lintas semester tersebut mendorong mahasiswa meminta pihak kampus mengambil langkah serius. Penanganan kasus dinilai perlu dilakukan secara transparan, dengan memastikan keselamatan, kerahasiaan identitas, serta pemulihan kondisi psikologis para pelapor.

Tujuh Tuntutan Mahasiswa kepada Pimpinan Kampus

Merespons dugaan kasus tersebut, mahasiswa menyampaikan tujuh poin tuntutan utama kepada pimpinan kampus. Tuntutan itu mencakup pendampingan psikologis dan bantuan hukum gratis bagi korban, pengusutan secara menyeluruh, serta pemberian sanksi tegas apabila dugaan pelanggaran terbukti.

Mahasiswa juga mendesak rekonstruksi total Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), baik di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Pasundan.



Desakan pembenahan Satgas PPKS menjadi salah satu poin penting karena mahasiswa menginginkan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang dapat diakses dengan aman, independen, serta memberikan perlindungan kepada korban dari potensi intimidasi.

Selain itu, proses penanganan diharapkan tidak berhenti pada penerimaan laporan

Pihak kampus perlu memastikan setiap pengaduan diperiksa secara profesional, disertai tindak lanjut yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan

Perlindungan Korban Menjadi Prioritas

Dalam penanganan dugaan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi, perlindungan terhadap pelapor dan korban menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan. ● (Agus)

## Sasar Jalur Perlintasan Narkoba, Polda Banten Bidik Pelabuhan dan Ekspedisi

SERANG |  
Harian Merdeka

Kepolisian Daerah (Polda Banten) menegaskan bahwa Banten menempati posisi strategis sebagai jalur perlintasan utama peredaran gelap narkotika dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa.

Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Banten, Kombes Pol Wiwin Setiawan, mengungkapkan bahwa permintaan pasar (demand) narkotika di wilayah Banten tetap ada dan ditunjukkan melalui sejumlah penindakan hukum terhadap para tersangka maupun pengguna. Namun, jika dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya, volume peredaran lokal di Banten tergolong lebih kecil.

"Secara karakteristik,



wilayah hukum Polda Banten merupakan jalur perlintasan peredaran narkotika dari arah Sumatera menuju Jawa, bukan daerah tujuan akhir," ujar Wiwin dalam keterangannya, Jumat (16/10/2026).

Wiwin menjelaskan, indikasi Banten sebagai jalur perlintasan dibuktikan dari deretan pengungkapan kasus oleh Ditresnarkoba Polda Banten. Dari berbagai operasi penindakan, petugas kerap menyita ba-

rang bukti dalam jumlah besar yang sedianya hendak didistribusikan ke Jakarta, Jawa Barat, maupun Jawa Timur.

"Sebagian besar barang bukti berukuran besar yang melintas ditujukan ke Jakarta atau wilayah lainnya di Pulau Jawa. Sementara untuk pengedar lokal yang ditangkap di Banten, pasokan barangnya rata-rata juga didapat dari Jakarta," tutur Wiwin.

Menyikapi posisi geografis yang rawan dimanfaatkan jaringan pengedar internasional maupun antarpulau tersebut, Polda Banten memperketat pengawasan di titik-titik penyekatan vital, khususnya pintu masuk pelabuhan penyeberangan utama seperti Pelabuhan Merak, Cilegon.

"Pengawasan dan razia rutin di pintu keluar-masuk pelabu-

han terus diprioritaskan untuk mengantisipasi modus penyelundupan barang haram tersebut," tegasnya.

Selain pengetatan di pelabuhan, Polda Banten juga intensifkan pemantauan terhadap modus peredaran via jasa pengiriman ekspedisi. Belum lama ini, Ditresnarkoba Polda Banten berhasil menggagalkan pengiriman 11 kilogram ganja melalui teknik penyerahan tertuju (controlled delivery) hingga ke wilayah Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, serta mengamankan dua orang tersangka pada Kamis (8/10/2026).

"Setiap pergerakan paket yang mencurigakan langsung kami lakukan profiling perjalanan logistiknya hingga ke titik penerima akhir," pungkas Wiwin.

● (Egi)

# Update Korupsi KPR Karawang: Kejari Sita Aset Senilai Rp 11 Miliar

KARAWANG | **Harian Merdeka**

Kejaksaan Negeri Karawang, Jawa Barat, menyita 12 bidang tanah, tiga unit mobil, dan uang Rp829,5 juta terkait kasus dugaan korupsi penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) kepada PT Bumi Arta Sedayu (BAS).

Kepala Kejaksaan Negeri Karawang Dedy Irwan Virantama dalam keterangannya di Karawang, Jumat, mengatakan penyitaan tersebut merupakan upaya mengamankan barang bukti sekaligus memulihkan kerugian keuangan negara.

“Untuk aset tanah yang disita ini meliputi 12 bidang tanah yang berlokasi di Desa/Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, dengan total luas 9.645 meter persegi. Nilai taksiran aset tanah ini mencapai Rp9,9 miliar,” kata Dedy.

Penyitaan dilakukan ber-



dasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor PRINT-3007A/M.2.26/Fd.2/08/2026 tanggal 3 September 2026 juncto Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 38/Pid.B.SITA/2026/PN Cbi tanggal 12 Oktober 2026.

Selain tanah, tim penyidik pidana khusus Kejari Karawang menyita tiga mobil yang terkait dengan perkara tersebut, yakni Toyota Vellfire, Hyundai Ioniq atas nama PT BAS, serta Wuling Confero S 1.5 L atas nama tersangka HJ.

Dedy menyebutkan nilai taksiran ketiga kendaraan tersebut mencapai sekitar Rp1,15 miliar.

Penyidik juga menyita uang sebesar Rp829,5 juta yang berasal dari rekening Bank BNI atas nama PT BAS.

“Penyitaan sejumlah aset dalam pengungkapan kasus korupsi penyaluran KPR ini merupakan upaya untuk mengamankan barang bukti sekaligus memulihkan kerugian keuangan negara,” katanya.

Dedy mengatakan penyitaan aset tersebut menjadi bagian dari upaya penanganan perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kejari Karawang juga menegaskan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam proses hukum.

Dalam kasus dugaan korupsi penyaluran KPR tersebut, Kejari Karawang sebelumnya telah menetapkan tujuh orang

sebagai tersangka. Perkara itu diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp237 miliar.

Tiga tersangka berinisial BMY, AA, dan DPP merupakan pejabat di salah satu bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) Kantor Cabang Karawang.

Sementara itu, empat tersangka lainnya berasal dari PT BAS, yakni VY, HJ, OH, dan HH.

PT BAS merupakan pengembang perumahan yang menerima fasilitas kredit dari salah satu bank milik negara untuk pembangunan Perumahan Citra Swarna Grande dan Kartika Residence di Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.

Perusahaan tersebut merupakan bagian dari Citra Swarna Group yang bergerak di bidang pembangunan perumahan dan kawasan komersial. ● (Egi)

## GRUP ASTRA

Merespons aduan serta gelombang desakan penanganan kasus agraria struktural di Sulawesi Barat tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan tanggapan singkat namun tegas saat dikonfirmasi, Sabtu (17/10/2026).

“Oke Bang, Diteruskan Ke Kabareskrim,” ujar Jenderal Suyudi Ario Seto.

Respon singkat orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut mengisyaratkan bahwa dugaan pelanggaran hukum dan potensi kerugian negara yang telah berlangsung selama puluhan tahun ini akan segera ditelaah langsung oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

**Dua Puluh Sembilan Tahun Pembinaan dan Korupsi Agraria**

Kasus ini mencuat setelah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) & Advokasi Tomakaka Justice Indonesia membongkar rekam jejak penguasaan lahan ilegal di Pasangkayu. Berdasarkan penelusuran dokumen pertanahan, data digitalisasi BPN, serta temuan lapangan Satgas Penertiban Kawasan Hutan, tiga entitas anak perusahaan Grup PT Astra Agro Lestari Tbk.—yakni PT

Letawa, PT Mamuang, dan PT Pasangkayu—diduga kuat menguasai sedikitnya 1.763 hektare lahan di luar HGU.

**Pola penguasaan lahan tersebut dinilai menabrak tata kelola hukum secara eksplisit:**

1. Pola “Tanah Dulu, Hukum Belakangan”: Lahan mulai dibuka dan ditanami sawit sejak 1990–1991, sedangkan Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan baru terbit pada 1996, disusun penerbitan HGU utama pada 1997.

2. Penguasaan Tanpa HGU yang Terbiarkan: Negara melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju sejatinya telah mencatat secara resmi pada 24 Oktober 1997 bahwa sedikitnya 325 hektare perkebunan sawit PT Letawa di Dusun Siparappe berada di luar HGU. Namun, pembiaran tersebut berlangsung tanpa tindakan hukum selama hampir tiga dekade.

3. Pelanggaran Diktum Batal Demi Hukum: SK Menteri Kehutanan No. 99/Kpts-II/1996 memuat Diktum Kesembilan yang menegaskan bahwa pelepasan kawasan hutan batal demi hukum jika HGU tidak diselesaikan dalam tempo satu tahun. Kendati baru

dimohonkan kembali 13 tahun kemudian (2009), HGU tetap diterbitkan pada 2013 tanpa evaluasi audit hukum atas status tanah sebelumnya.

**Uji Pidana Korupsi dan Asimetri Penegakan Hukum**

Secara hukum, penguasaan ribuan hektare lahan di luar HGU yang dikelola secara komersial selama lebih dari 30 tahun bukan lagi sekadar sengketa batas administratif. Mengingat setiap hektare lahan sawit produktif menghasilkan puluhan ton Tandani Buah Segar (TBS) per tahun, nilai pemanfaatan ilegal beserta potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hilang diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Hal ini memenuhi unsur pengujian dugaan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor) serta pertanggungjawaban korporasi (Perma No. 13 Tahun 2016).

Di sisi lain, ketimpangan hukum yang ekstrem terus dialami masyarakat lokal dan petani di Pasangkayu. Petani yang memungut berondolan sawit kerap berhadapan dengan proses pidana kilat atas tuduhan pencurian atau penyerobotan. Padahal,

Kabareskrim Polri telah menerbitkan Surat Telegram Nomor STR/2230/VIII/RES.1.24./2026 untuk menghentikan sementara (moratorium) kriminalisasi warga di wilayah konflik agraria struktural sampai status hukum objek tanah dipastikan.

**Ujian Bagi Kapolda Baru dan Komitmen Polri**

Masyarakat Sulawesi Barat kini menaruh harapan pada Kapolda Sulawesi Barat yang baru dilantik, Irjen Pol Totok Suharyanto. Rekam jejak Totok yang sebelumnya menjabat Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri—termasuk keberhasilannya memimpin penyitaan aset lahan senilai Rp4,8 triliun di Bali—menjadi acuan bahwa Polri memiliki kapasitas penuh untuk menindak kejahatan korporasi skala besar.

Penanganan perkara Pasangkayu melalui gelar perkara terbuka, overlay geospasial resmi, serta penghitungan audit kerugian negara bersama BPK/BPKP menjadi ujian krusial untuk membuktikan bahwa penegakan hukum di Indonesia berlaku setara, baik terhadap rakyat kecil maupun korporasi raksasa. ● (Egi)



## Misi Nikita Mirzani di Beautiful Pain

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Film Beautiful Pain berangkat dari keinginan Nikita Mirzani, mengangkat kisah perempuan yang berjuang menentukan jalan hidupnya sendiri. Produser Hanung Bramantyo mengungkapkan, ide tersebut sudah muncul sejak empat tahun lalu, dengan sorotan pada perjuangan menjadi orang tua tunggal hingga keberanian keluar dari hubungan toxic.

Film yang disutradarai Dmaz Brodjonegoro itu, menjadi proyek Nikita sebagai executive producer sekaligus pemain. Namun, sejak awal, Nikita menegaskan tak ingin mengangkat kehidupan pribadinya, melainkan kisah perempuan dengan pengalaman serupa. Hal itu diungkapkan Hanung, saat menghadiri gala premiere Beautiful Pain di Epicentrum XXI, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin.

"Dia dari awal sudah bicara ke saya, 'Saya tidak mau membuat film tentang diri saya, tapi saya pengen bicara tentang perempuan yang mungkin nasibnya seperti saya.' Itu empat tahun yang lalu," kata Hanung. ● (dth)

JAKARTA |  
**Harian Merdeka**

Film Beautiful Pain berangkat dari keinginan Nikita Mirzani, mengangkat kisah perempuan yang berjuang menentukan jalan hidupnya sendiri. Produser Hanung Bramantyo mengungkapkan, ide tersebut sudah muncul sejak empat tahun lalu, dengan sorotan pada perjuangan menjadi orang tua tunggal hingga keberanian keluar dari hubungan toxic.

Film yang disutradarai Dmaz Brodjonegoro itu, menjadi proyek Nikita sebagai executive producer sekaligus pemain. Namun, sejak awal, Nikita menegaskan tak ingin mengangkat kehidupan pribadinya, melainkan kisah perempuan dengan pengalaman serupa.

Hal itu diungkapkan Hanung, saat menghadiri gala premiere Beautiful Pain di Epicentrum XXI, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin.

"Dia dari awal sudah bicara ke saya, 'Saya tidak mau membuat film tentang diri saya, tapi saya pengen bicara tentang perempuan yang mungkin nasibnya seperti saya.' Itu empat tahun yang lalu," kata Hanung.

# JAY IDZES SUDAH PULIH

Hanung mengaku sempat menganggap gagasan tersebut kontroversial. Ia kemudian, mencoba mengembangkan pemikiran Nikita mengenai perempuan yang memilih menjadi orang tua tunggal dan menjaga kesehatan mental demi anak-anaknya.

"Saya melakukan proses penulisan skenario, mencerna pemikiran Niki tentang jangan takut menjadi single parent," tuturnya.

Menurut Hanung, tema tersebut kala itu dianggap belum tentu menarik secara komersial. Namun, Nikita yakin kisah perempuan yang berani mengambil keputusan demi kehidupan lebih sehat memiliki penontonnya sendiri.

"Niki yakin ada orang yang akan menonton film ini, yaitu para perempuan yang kepingin menjadi dirinya sendiri, yang memilih menjadi sehat, menjaga kewarasan demi anak-anaknya dan lepas dari hubungan yang toxic," jelasnya.

Untuk mengembangkan ide tersebut, Hanung melibatkan penulis skenario Titien Wattimena. Naskahnya kemudian dikembangkan bersama Dmaz hingga menjadi film yang siap tayang di bioskop.

Hanung berharap pesan Beautiful Pain bisa menyentuh penonton, terutama perempuan yang memiliki pengalaman serupa.

"Semoga ini semuanya bisa sampai ke hati penonton, terutama para perempuan," tambahnya.

● (dts)



terbit setiap sore Senin s/d Sabtu

**HARIAN MERDEKA**  
aspirasi rakyat

**Langganan ePaper...**

Dapatkan berita terkini setiap sore langsung di perangkatmu.

Hanya **Rp50.000/bulan** Hubungin **Alan Oskar : +62 895-2285-1963**